

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Di era modern ini sering terjadi adanya bentuk kejahatan seperti penyeludupan imigran dan perdagangan manusia non-seksual, yang sampai saat ini sulit untuk diberantas oleh pemerintah. Ibu Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa *human trafficking* adalah bentuk dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk terburuk dari pelanggaran HAM. Protokol Perdagangan manusia mengatakan bahwa perdagangan manusia yaitu adanya penerimaan manusia, pengangkutan, pemindahan, perekrutan, dan penampungan, dengan adanya ancaman atau penggunaan kekuatan dan berbagai bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dan adanya pemanfaatan dengan tujuan memperoleh persetujuan dalam pihak lain untuk melakukan eksploitasi. Eksploitasi mempunyai berbagai ragam, yaitu eksploitasi prostitusi pihak lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau jasa, perbudakan atau praktik-praktik yang sama dengan perbudakan, kerja paksa atau pemindahan, dan adanya penyalahgunaan atau implantasi organ.

Perdagangan manusia ada tiga aspek yang berbeda. Pertama yaitu aspek tindakan mengacu pada perekrutan, pemindahan dan penyembunyian korban. Kedua adalah di mana tempat yang menyebabkan korban berakhir dengan eksploitatif. Ketiga adalah tujuan dari eksploitasi itu sendiri.

Kasus perekrutan terhadap nelayan yang dilakukan secara ilegal sudah tidak asing didengar oleh dunia, pemerintah bahkan bagi masyarakat sendiri. Dalam industri penangkapan ikan atau industri perikanan hal ini adalah sebuah bentuk pekerjaan yang keras dan menuntut ketahanan fisik dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah yang jauh dari geografis. Perbudakan adalah suatu kejadian yang dilakukan seseorang yang dianggap sebagai budak yang berada dibawa pimpinan orang (Husni Lalu 2003:1).

Terdapat ada 2 bentuk jenis perbudakan yang ada di zaman sekarang ini, yaitu perbudakan dalam bentuk kontrak kerja dan pelacuran. Secara tidak langsung hal ini berubah menjadi bentuk penindasan dan perbudakan halus dengan cara yang berbeda. Perbudakan modern (*modern slavery*) adalah kondisi di mana seseorang memperlakukan orang lain sebagai kepunyaannya, sehingga hak orang itu terampas lalu diesploitasi dari kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan, dalam hal ini orang bisa dipekerjakan dan dibuang begitu saja tidak ada apa-apanya.

Perbudakan tentu sangat bertentangan dengan HAM yang didasarkan pada hanya manusialah yang memiliki akal budi, hati nurani, dan bebas dalam berkehendak. maka dengan itu perbudakan membuat manusia tidak dengan selayaknya orang tersebut dikatakan sebagai manusia ( Khadafi, 2016). Dalam kasus perbudakan berdasarkan peristiwa yang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di industri perikanan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM berat yang masuk ke dalam kategori perlakuan *human trafficking*. Seperti

yang diketahui bahwa *human trafficking* merupakan hal yang sangat bertentangan dengan HAM.

Karena sering adanya berita yang terungkap tentang kasus perbudakan terhadap anak buah kapal yang berhasil diamankan dan ditangani oleh pemerintah. Sampai saat ini kasus perbudakan terhadap anak buah kapal masih terus ada terjadi karena masyarakat yang dengan mudah lengah untuk dibuai oleh perusahaan kapal asing karena faktor ekonomi, yang kemudian merekrut mereka dengan diiming-imingi dengan gaji yang besar dan fasilitas yang diberikan saat bekerja nantinya. Pada kenyataannya itu hanyalah sebagai sebuah umpan untuk para masyarakat agar mudah untuk tertarik bekerja di perusahaan kapal asing tersebut. Para nelayan atau anak buah kapal tersebut secara tidak langsung diperdagangkan untuk dieksploitasi sebagai tenaga kerja di kapal penangkap ikan dan di pelabuhan-pelabuhan serta pengolahan ikan.

Praktik perbudakan ternyata memunculkan adanya 2 temuan pelanggaran lain. Pertama, adanya praktik perikanan ilegal, tak tercatat dan tidak teregulasi. Praktik semacam ini tidak mudah diberantas karena proses perikanan ilegal dan pintu keluar masuknya hasil yang mereka dapatkan adalah pelabuhan yang tidak diawasi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kedua, adanya praktik pungli yang dilakukan pihak perusahaan kepada para petugas yang ada di lapangan karena adanya laporan oknum pengawas dari KKP yang telah memantau usaha perikanan sering melakukan adanya pungutan liar (Fotokita, 2020). Aksi kejahatan dan tindakan kriminalitas dilakukan di laut atau disebut dengan *ocean crime*. Bukan hanya melakukan

pencurian ikan, tetapi juga perdagangan manusia dan narkoba. Tentu hal ini menjadi perhatian dunia internasional. Keamanan internasional melakukan investigasi khusus untuk menelusuri dan menanggulangi serta bersiaga untuk adanya aksi kriminalitas di laut. Menteri Kelautan dan Perikanan merasa khawatir dengan banyaknya kriminalitas mulai bermunculan yang sangat mungkin dilakukan di perairan laut Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang terkenal akan sumber daya alam yang kaya akan laut sangat luas dan pulau yang banyak. Data FAO dalam *The State of World Fisheries and Aquaculture* (Kondisi Perikanan dan Budidaya Perairan Dunia) menunjukkan bahwa Indonesia adalah penghasil penangkapan ikan terbesar kedua di dunia setelah Cina dengan jumlah produksi ikan mencapai 5.420.247 ton pada tahun 2012 (7,3% dari produksi ikan dunia). Hal itu membuat banyaknya kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia beberapa dengan cara yang ilegal dan melakukan *Illegal fishing* di perairan Indonesia. Selain itu secara geografis juga, Indonesia berada diantara 2 benua adalah benua Asia dan Benua Australia dan berada diantara 2 Samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, di mana letak Indonesia menjadi tempat yang strategis dalam jalur pelayaran bahkan perdagangan di area internasional (Al Mushowwir). Hal itu juga membuat banyak memicu terjadinya perekrutan kasus ABK secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan kapal asing dan melakukan perbudakan terhadap ABK atau disebut dengan *Human Trafficking*.

Warga negara asing yang menjadi korban perdagangan manusia dalam industri perikanan Indonesia secara umum memiliki faktor ekonomi yang

diyakini menjadi dorongan untuk melakukan migrasi demi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bagi para tenaga kerja asing, perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, nilai tukar dan tingkat upah menjadi faktor daya tarik migrasi yang menarik para migran dari negara asalnya ke negara-negara luar. Selain dari faktor ekonomi dan kemiskinan, beberapa hal menunjukkan adanya faktor nonekonomi penduduk keluar negara mereka masing-masing (Al Mushowwir). Terbukti, kebanyakan imigran ilegal mengalami atau menjadi korban *Human Trafficking* di Indonesia saat mereka dipekerjakan di wilayah Indonesia. Berikut grafik yang menunjukkan meningkatnya jumlah imigran ilegal masuk ke Indonesia dari tahun 2013-2017.

Grafik 1. 1 Imigran yang masuk ke Indonesia tahun 2013-2017



Sumber :

\*)“10.593 Kasus Imigran Ilegal Masuk Perairan Indonesia”, <http://republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/11/06/mvuci6-10593-kasus-imigran-ilegal-masuk-perairan-indonesia>, diakses pada tanggal 16 Maret 2018.

\*\*)”Jumlah Imigran yang Masuk Indonesia di 2014 Naik Signifikan”, <https://news.okezone.com/read/2014/05/08/340/982176/jumlah-imigran-yang-masukindonesia-di-2014-naik-signifikan>, diakses pada tanggal 16 Maret 2018. \*\*\*)”Di Indonesia, Hampir 12 Ribu

Pengungsi Menunggu Nasib”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150519160927-106-54262/diindonesia-hampir-12-ribu-pengungsi-menunggu-nasib>, diakses pada tanggal 16 Maret 2018. \*\*\*\*\*)”Hingga April 2016, RI Tampung 13.745 Pengungsi dan Pencari Suaka”, <https://kumparan.com/@kumparannews/14-ribu-imigran-gelap-tersebar-di-indonesia>, diakses pada tanggal 16 Maret 2018. 7 “Imigran Gelap dan Peran Negara”, <https://herussetyo.com/2012/03/25/imigran-gelap-dan-perannegara/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2017. 7 \*\*\*\*\*)”14 Ribu Imigran Gelap Tersebar di Indonesia”, <https://kumparan.com/@kumparannews/14-ribu-imigran-gelap-tersebar-di-indonesia>, diakses pada tanggal 16 Maret 2018.

*International Organization for Migration (IOM)* Maret 2005 hingga Desember 2014, total kasus *human trafficking* di Indonesia mencapai 6.651 orang korban. Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah perairan sebesar 6.320.000 km<sup>2</sup> atau dominan sebesar 75% adalah seluruh luas dari negara, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya di bidang kelautan dan perikanan (KKP,2014). Adanya potensi tersebut dalam hal ini kemudian disalahgunakan oleh salahsatu investor asing dari Thailand yang masuk secara ilegal, yaitu PT.Pusaka Benjina Resources (PBR). Kasus yang terjadi adalah kasus perbudakan pada tahun 2015 di kepulauan Indonesia tepatnya di Benjina yang berada di kepulauan terpencil di Kabupaten kepulauan Aru, Maluku. Benjina dikenal dengan sebagai kawasan dalam industri perikanan di laut dunia. Melalui kasus Benjina mulai membuka mata dunia dengan adanya kasus *human trafficking*, eksploitasi dan *illegal fishing* di laut Indonesia (DARILAUT.ID, 2019). Kasus Benjina merupakan kasus yang melakukan adanya penyelematan besar-besaran terhadap para ABK atau imigran ilegal yang dieksploitasi sebagai tenaga kerja bagi kapal penangkapan ikan yang juga terlibat dalam penangkapan ikan yang ilegal. Kasus ini menyoroti besarnya ruang lingkup bidang kejahatan transnasional. ABK tersebut direkrut dari berbagai negara dan dipaksa bekerja

dengan status ilegal di laut Indonesia. Hukum dan peraturan nasional yang ada tidak dilakukan atau dituruti dan konvensi internasional juga tidak dihiraukan. Perusahaan kedok (*front company*) didirikan dan pengalihmuatan (*transshipment*) ikan dengan ilegal dilakukan di zona ekonomi eksklusif dan wilayah perbatasan Indonesia, dengan tujuan untuk menyulitkan para pihak pengawasan untuk melakukan operasi pencegahan. Sehingga akhirnya penangkapan dapat masuk ke dalam pasokan global dan kemudian ditangani oleh pemasok ikan yang resmi, tanpa menyadari asal usul hasil yang didapatkan dan adanya eksploitasi manusia dibalik itu semua. Perdagangan manusia di dalam industri penangkapan ikan bukanlah hal yang jarang terjadi namun seringkali terjadi tanpa hukuman dalam waktu yang lama. (KKP, 2016).

Pada bulan Maret tahun 2015 terungkaplah dari hasil investigasi yang berjudul “*Are slaves catching the fish you buy ?*” yang dilakukan selama satu tahun oleh *The Associated Press (AP)* yaitu kasus Benjina bahwa terungkap adanya perbudakan, perdagangan orang atau kerja paksa tanpa dibayar yang dilakukan oleh perusahaan kapal asing terhadap para ABK yang ternyata kapal asing diindikasikan melakukan adanya kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. *IUU Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang melanggar perundangan yang berlaku, yaitu pelanggaran terhadap UU Perikanan. Kasus perbudakan yang dialami oleh ABK tersebut dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources yang merupakan perusahaan berasal dari Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia dalam sektor perikanan di Indonesia. Korban perbudakan anak buah kapal tersebut ialah berasal dari warga

negara asing yaitu warga negara Myanmar, Kamboja dan Laos. Indonesia pada saat itu juga langsung melakukan tindakan dengan melakukan penanganan dan pengamanan cepat terhadap perusahaan asing tersebut. Situasi di Benjina menimbulkan adanya gejala perdagangan manusia yang jauh lebih luas, tersembunyi dan sangat berbahaya, tidak hanya dalam industri penangkapan ikan antara Indonesia dan Thailand saja , tetapi berdampak secara global.

Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, menyatakan bahwa perusahaan Thailand tersebut selalu melakukan pelanggaran aturan internasional seperti penyalahgunaan Penggunaan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI) di mana surat itu ternyata sudah kadaluarsa. Menurut Susi Pudjiastuti perusahaan asing tersebut dengan sengaja membangun perusahaan di tempat atau lokasi terpencil untuk mempersulit penjangkauan dan pengawasan dari pihak yang berwenang. Kapal-kapal serta perusahaan asing tersebut ternyata sering melakukan pelabuhan tikus dan tidak menggunakan pelabuhan resmi yang telah disediakan pemerintah. Munculnya kasus perbudakan perusahaan perikanan di Benjina, dikhawatirkan akan memberi pengaruh yang negatif bagi produk perikanan di Indonesia. Menteri KKP, Susi Pudjiastuti was-was jika produk perikanan Indonesia bisa diboikot oleh perusahaan internasional (CNN Indonesia, 2015).

Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa melalui kasus Benjina ini bukan hanya menjadi isu nasional tetapi juga menjadi isu internasional juga telah menyoroti kasus tersebut. Menurut Susi Pudjiastuti, Presiden Jokowi telah memerintahkan para pihak berwenang untuk mengatasi perbudakan di kapal



Benjina itu untuk dapat segera diselesaikan. Dengan itu Menteri Kelautan dan Perikanan juga meminta semua pihak berwenang untuk terlibat dalam menyelesaikan dan mencegah kasus Benjina. Karena kasus pencurian ikan tersebut merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap mudah, karena kasus ini juga menyangkut adanya kasus kemanusiaan tidak biasa. Selain KKP dan satgas 115 IUU Fishing, ada salahsatu organisasi internasional yang memiliki peranan besar dalam kasus Benjina, yaitu IOM. Berkembangnya permasalahan tersebut membuat para migran ilegal ini tidak mempunyai pilihan lain selain mencoba masuk ke suatu negara secara ilegal, untuk itu organisasi internasional yang berperan penting dalam melakukan proses penanganan kasus tersebut adalah International Organization For Migration (IOM). Di tahun 2015 KKP Indonesia Dan IOM Indonesia merespon ulasan *investigative Associated Press (AP)*, yaitu media asing yang berasal dari Amerika Serikat untuk melakukan operasi penyelamatan ABK yang menjadi korban perdagangan manusia dan dieskplotasi di industri penangkapan ikan Indonesia tepatnya di Benjina.

IOM merupakan organisasi internasional yang berperan dan bertujuan untuk mendukung praktik migrasi yang tertib dan manusiawi, mempromosikan kerjasama internasional di dalam isu migrasi, membantu dalam memberikan solusi terhadap isu migrasi dan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi yang membutuhkan, termasuk bagi para pengungsi. IOM sejak tahun 2005 dalam menangani kasus perdagangan manusia IOM di terfokus pada pencegahan *human trafficking* dengan meningkatkan kesadaran dan pemantauan rekrutmen tenaga kerja, perlindungan korban *human trafficking* melalui bantuan langsung

pada korban serta melakukan adanya perkembangan kapasitas institusional dari aktor pemerintah dan non-pemerintah, penguatan sistem peradilan Indonesia dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum serta memperbaiki jalur keadilan untuk para korban *human trafficking*, dan membangun kemitraan lintas sektoral melalui pembuatan kebijakan dan perencanaan dan bantuan.

Pada 1991 pemerintahan Indonesia berstatus yaitu menjadi pengamat IOM. Betapa pentingnya peran IOM yang merupakan suatu organisasi yang sangat diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dengan negara-negara tujuan migran sekaligus memastikan hak para migran tersebut dapat dipenuhi dengan baik.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, guna memudahkan penulis dalam menganalisis masalah yang ada maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran IOM dalam menangani kasus imigran ilegal ?
2. Bagaimana terjadinya imigran ilegal dalam kasus di Benjina ?
3. Bagaimana peran IOM dalam menangani kasus imigran ilegal di Benjina ?

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian skripsi profesi ini lebih terfokus. Dalam hal ini, penulis

membuat batasan masalah seputar peranan IOM dengan memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan terhadap para ABK imigran ilegal yang mengalami eksploitasi atau *human trafficking* pada saat bekerja di kapal asing dalam kasus Benjina, untuk memenuhi hak-hak kemanusiaan. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2015-2017 di mana terkuak adanya kasus perbudakan terhadap ABK asing di Benjina yang dilakukan oleh kapal asing atau perusahaan asing ilegal dan kemudian adanya Peran *International Organization For Migration* dalam menangani imigran ilegal dalam kasus Benjina pada tahun 2015-2017.

#### **1.4.Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah, **“Bagaimana peran International Organization For Migration (IOM) dalam menangani imigran ilegal dalam kasus Benjina ?”**.

#### **1.5.Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Sebagai upaya untuk menjelaskan dan tujuan umum dari pembahasan penelitian, maka penulis harus memiliki tujuan jelas dari identifikasi masalah yang sudah dipaparkan. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran IOM dalam penanganan kasus Benjina pada tahun 2015.
2. Untuk mengetahui kronologis terjadinya imigran ilegal dalam kasus Benjina.
3. Untuk mengetahui peran yang dilakukan *International Organization For Migration* (IOM) terhadap para korban perbudakan anak buah kapal dalam kasus Benjina.

### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah penulis paparkan diatas, adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Sebagai prasyarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.
2. Memberikan aplikasi teoritis dalam studi Hubungan Internasional pada peran *International Organization For Migration* (IOM) dalam kasus Benjina.
3. Secara khusus memberikan informasi kepada pembaca mengenai peran *International Organization For Migration* (IOM) dalam kasus Benjina.